

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Ketidak mampuan ini ditandai dengan berbagai macam penyebab seperti rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini akan sangat berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan dan standar pendidikan.

Kemiskinan merupakan dimana keadaan seseorang individu atau kelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan memiliki standar tertentu (Badan Pusat Statistik, 2016). Dalam arti proper, Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: (1) Kemiskinan, (2) Ketidakberdayaan (powerless), (3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), (4) Ketergantungan (dependency), (5)

Keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologi. (Chambers, 2010).

Luasnya dan sejauh mana kemiskinan yang melanda disetiap negara tergantung pada dua faktor: (1) tingkat rata-rata pendapatan nasional dan (2) tingkat ketimpangan atau tidak pemerataan dalam dalam distribusi pendapatan itu. Semakin tidak merata distribusi pendapatan itu, semakin luas pula terjadinya kemiskinan (Todaro, 2006).

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki empat bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

b. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal

dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif bergantung pada pihak lain.

c. Kemiskinan Relatif

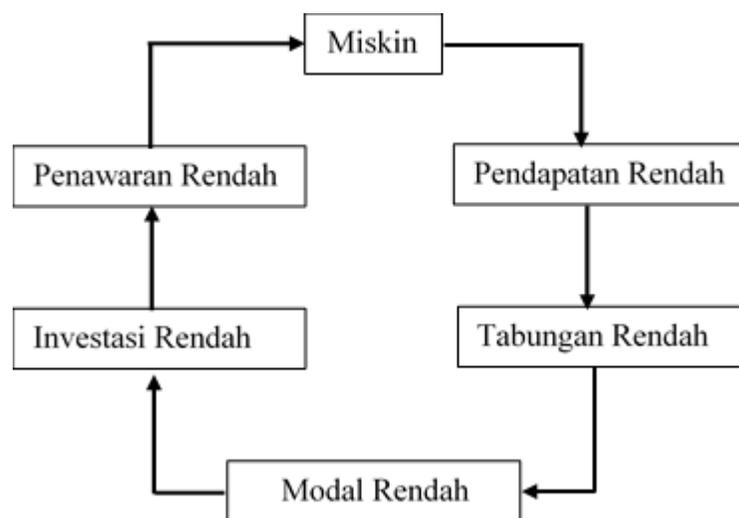
Kemiskinan Relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Menurut Ragnar Nurkse dengan memahami lingkaran yang tidak berujung maka kemiskinan harus diatasi dengan memutus satu mata rantai, misal dengan memutus ketiadaan modal pada penduduk miskin. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan modal bagi penduduk miskin.

Bila yang terjadi dalam kategori kemiskinan kultural berupa faktor internal penduduk miskin itu sendiri, pengatasan masalah nya pun harus secara kultural dan pengatasan faktor-faktor internal. Contohnya dengan melakukan pendidikan dan pelatihan pada penduduk miskin agar kreatif, dinamis dan berkeinginan untuk meraih kemajuan.



Gambar 2.1
Lingkaran Setan Kemiskinan

Di Indonesia Badan Pusat Statistik (BPS) Menentukan kemiskinan absolut Indonesia merupakan ketidak mampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum energi kalori (2.100 kilo per kapita per hari) yang dipergunakan tubuh dan kebutuhan dasar minimum untuk sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi dan kebutuhan dasar lain.

2. Jumlah Penduduk

Menurut Sukirno (1997), perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Adapun Faktor pendorong

tersebut terbagi menjadi 2 antara lain; pertama, memungkinkan semakin banyaknya tenaga kerja. Kedua, perluasan pasar, karena luas pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Sedangkan penduduk disebut faktor penghambat pembangunan karena akan menurunkan produktivitas. Dan akan terdapat banyak pengangguran. Negara sedang berkembang kebanyakan mengalami dengan laju pertumbuhan yang tinggi, fakta menunjukkan tiga per empat penduduk dunia tinggal di Negara-negara sedang berkembang. Masalah kependudukan yang dihadapi yaitu tingginya tingkat kelahiran dan tinggi pula angka kematiannya, akan tetapi masih besar angka kelahirannya. Kelahiran yang tinggi salah satunya di sebabkan oleh usia pernikahan yang masih dini, dan kurangnya pengetahuan akan KB. Sementara itu angka kematian yang tinggi disebabkan oleh masih rendahnya kualitas kesehatan yang dimiliki penduduk Negara sedang berkembang.

Menurut Samadi (2006), Sudah sejak lama masalah kependudukan menjadi perhatian manusia. Banyak negarawan ataupun para ahli yang memperbincangkan besarnya jumlah penduduk yang seimbang berdasarkan pertimbangan politik, sosial, dan ekonomi. Sebelum abad ke-17 masalah kependudukan didasarkan atas pandangan akan pentingnya jumlah penduduk tetap dipertahankan, bahkan jika mungkin malah ditingkatkan. Namun, sejak abad ke-17, saat penduduk dunia mulai pesat, ditambah dengan terjadinya

ledakan penduduk pada abad ke-18, banyak pandangan yang menentang peningkatan jumlah penduduk.

Pengelompokan data kependudukan berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri yang sama dinamakan komposisi penduduk, oleh karena itu, komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk berdasarkan karakteristik yang sama, misalnya komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan.

Umur dan jenis kelamin merupakan karakteristik penduduk yang paling pokok, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin paling sering digunakan dalam berbagai bidang.

Komposisi penduduk menurut umur dikenal dengan istilah struktur penduduk, biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok umur. Setiap kelompok umur pada umumnya memiliki jarak antara umur 5 tahun. Struktur penduduk tidak sama antara Negara yang satu dan Negara yang lain, antara daerah perdesaan dan perkotaan, serta antara pulau yang satu dan pulau yang lain. Struktur penduduk ini dipengaruhi oleh tiga faktor demografis, yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan penduduk).

Berdasarkan pengelompokan tersebut diatas, struktur penduduk dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut :

- a. Umur 0-14 tahun dinamakan usia muda (usia belum produktif). Jika suatu wilayah atau Negara sebagian besar penduduknya berusia muda, wilayah atau Negara sebagian besar penduduknya berusia

muda, wilayah atau Negara tersebut termasuk dalam struktur penduduk muda.

- b. Umur 15-64 tahun dinamakan usia dewasa (usia produktif atau usia kerja). Jika suatu wilayah atau Negara sebagian besar penduduknya berusia dewasa, wilayah atau Negara tersebut termasuk dalam struktur penduduk dewasa.
- c. Umur 65 tahun dan lebih dinamakan usia tua (usia tidak produktif). Jika suatu wilayah atau Negara sebagian besar penduduknya berusia tua, wilayah atau Negara tersebut termasuk dalam struktur penduduk tua.

3. Tingkat Pengangguran

Menurut Sukirno (1999), pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Faktor utama yang menyebabkan pengangguran adalah kekurangan agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang akan mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat diantara tingkat pendapatan nasional yang dicapai (GDP) dengan

penggunaan tenaga kerja yang dilakukan; semakin tinggi pendapatan nasional (GDP), semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah di terima kerja tetapi belum memulai pekerjaannya.

Dari tahun ketahun pengangguran mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia karena indikator pembangunan yang berhasil salah satunya adalah mampu mengangkat kemiskinan dan mengurangi pengangguran secara signifikan. Apalagi di era globalisasi ini persaingan tenaga kerja semakin ketat terutama karena dibukanya perdagangan bebas yang memudahkan penawaran tenaga kerja asing yang diyakini lebih berkualitas masuk ke dalam negeri. Adapun Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya antara lain sbb:

1) Pengangguran Alamiah

Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh adalah keadaan dimana sekitar 95 persen dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran sebanyak lima persen inilah yang disebut sebagai pengangguran alamiah.

2) Pengangguran Friksional

Suatu jenis pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya.

3) Pengangguran Struktural

Pengangguran yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi. Tiga sumber utama yang menjadi penyebab berlakunya pengangguran struktural adalah:

- a) Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat permintaan barang dari industri yang memproduksi barang-barang yang kuno menurun dan akhirnya tutup dan pekerja di industri ini akan menganggur. Pengangguran ini disebut juga sebagai pengangguran teknologi.
- b) Kemunduran yang disebabkan oleh adanya persaingan dari luar negeri atau daerah lain. Persaingan dari luar negeri yang mampu menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih murah akan membuat permintaan akan barang lokal menurun. Industri lokal yang tidak mampu bersaing akan bangkrut sehingga akan timbul pengangguran.
- c) Kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan yang pesat dikawasan lain.

4) Pengangguran Konjungtor

Pengangguran yang melebihi pengangguran alamiah. Pada umumnya pengangguran konjungtor berlaku sebagai akibat pengurangan dalam

permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja, sehingga muncul pengangguran konjungtor.

Menurut Edwards (1974), untuk melakukan pengelompokan terhadap jenis-jenis pengangguran, sebaiknya perlu memahami dimensi-dimensi berikut ini :

- a) Waktu (banyak diantara mereka yang ingin bekerja lebih lama, misalnya jam kerjanya per hari, per minggu, atau per tahun)
- b) Intesias pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan)
- c) Produktivitas (kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh kurangnya sumberdaya komplementer dalam melakukan pekerjaan)

Berdasarkan beberapa kriteria tersebut, Edwards mengklasifikasikan lima jenis pengangguran yaitu :

- a) Pengangguran terbuka : baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja namun tidak memperoleh pekerjaan).
- b) Setengah menganggur (underemployment) : yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari minggu, musiman) kurang dari yang mereka mampu untuk kerjakan.
- c) Tampaknya bekerja namun tidak bekerja secara penuh : yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah menganggur, yang termasuk disini adalah:

1. Pengangguran tidak kentara (*disguised unemployment*) yaitu para petani yang bekerja di ladang selama sehari penuh, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu selama sehari penuh.
 2. Pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*) yaitu orang yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya.
 3. Pensiun lebih awal yaitu fenomena ini merupakan kenyataan yang terus berkembang di kalangan pegawai pemerintah. Di beberapa Negara, usia pension dipermudah sebagai alat untuk menciptakan peluang bagi kaum muda untuk dapat menduduki jabatan di atasnya.
- d) Tenaga kerja yang lemah (*impaired*) yaitu mereka yang mungkin bekerja full time, namun intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
- e) Tenaga kerja yang produktif yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif, namun karena sumberdaya komplementernya kurang memadai, maka mereka tidak dapat menghasilkan sesuatu dengan baik.

Pada masa sekarang usaha-usaha mengurangi pengangguran adalah dengan menggunakan rencana pembangunan ekonomi yang menyertakan rencana ketenagakerjaan secara matang. Disamping itu, disertai pula kesadaran akan ketenagakerjaan yang lebih demokratis menyangkut hak-hak memilih pekerjaan, lapangan pekerjaan, lokasi pekerjaan sesuai kemampuan, kemauan tenaga kerja tanpa diskriminasi.

Pemecahan masalah pengangguran terutama menjadi peran dan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi. Dengan adanya

otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah lebih serius menangani masalah ketenagakerjaan setempat.

4. Pendidikan

Yunus (1990) menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu bentuk pengaruh yang terdiri dari ragam pengaruh yang terpilih berdasarkan tujuan yang dapat membantu anak-anak agar berkembang. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003, mengatakan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensinya yang ada didalam diri peserta untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, kepribadian yang lebih baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan dan ketrempilan yang dibutuhkan oleh dirinya maupun masyarakat.

Todaro (1995) mengungkapkan pentingnya sebuah pendidikan disuatu Negara, terlebih dinegara berkembang seperti Indonesia ini. Pendidikan disemua tingkat atau jenjang pendidikan telah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu :

- a. Terciptanya angkatan kerja yang lebih produktif dan dibekali dengan tambahan pengetahuan dan keterampilan.

- b. Tersedia lapangan pekerjaan dan kesempatan memperoleh sumber penghasilan yang lebih banyak bagi para guru, karyawan sekolah, para pemborong bangunan atau gedung sekolah, penerbitan buku-buku pelajaran, perusahaan pembuat pakaian seragam sekolah dan sebagainya.
- c. Menciptakan suatu kelas pemimpin yang berpendidikan untuk mengisi jabatan-jabatan kosong dilembaga pemerintah dan perusahaan umum yang telah ditinggalkan oleh orang asing yang pulang kembali kenegaranya.
- d. Memberikan bentuk pendidikan dan pelatihan yang akan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, berhitung dan memiliki keterampilan dasar, disamping memacu sikap-sikap modern penduduknya.

B. Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

1. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan

Dalam kehidupan manusia memiliki proses, sejak lahir hingga meninggal. Namun dalam daur ulang kehidupan tersebut terdapat penduduk usia produktif, penduduk dalam usia produktif berusia pada rentang 15-65 tahun. Penduduk yang produktif akan membantu dalam kelancaran dari segi perekonomian dan pembangunan dalam suatu wilayah (bkkbn.go.id).

2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan

Arsyad (2010) menjelaskan mengenai hubungan antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya paruh waktu akan tetap tergolong kelompok masyarakat yang

miskin. Masyarakat yang sudah mempunyai pekerjaan dengan upah pada tingkat tertentu akan lebih produktif dibandingkan dengan masyarakat yang tidak bekerja karena pekerjaan memberikan pendapatan dan pendapatan hasil dari bekerja tersebut mampu dialokasikan sebagai anggaran biaya dalam menjalankan kehidupan secara layak dan berusaha keluar dari lingkaran kemiskinan (Todaro, 2006).

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan

IPM adalah salahsatu indikator pembangunan di suatu negara yamh terdiri dari berbagai indeks pengembangan kapasitas probadi ataupun sekelompok masyarakat dari beberapa indeks tersebut adalah penilaian mengenai pendidikan yang diperoleh masyarakat (Hudiyanto, 2014). Pendidikan memberikan kapasitas kepada individu-individu sehingga dapat memperoleh kualitas dalam memberikan pengaruh terhadap lingkungan dari skala terkecil sampai membentuk kekuatan kolektif yang lebih besar yaitu pembangunan Negara (Saleh, 2006).

C. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang kemiskinan di berbagai daerah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan periode waktu yang berbeda.

1. Saputra (2011) Meneliti mengenai “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di jawa

tengah, Indeks Pembangunan manusia berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, dan pengangguran berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

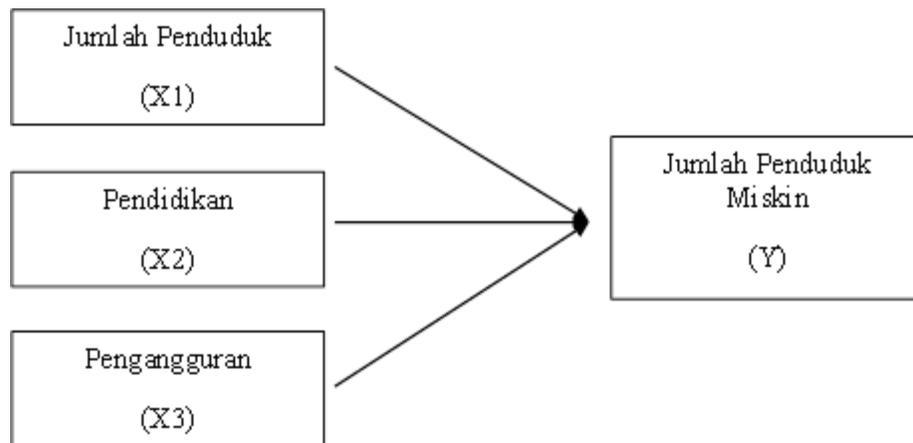
2. Saleh (2011) meneliti mengenai “Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional Di Indonesia”. Berdasarkan hasil-hasil empiric dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan per propinsi di Indonesia adalah indeks pembangunan manusia (terdiri dari pendapatan perkapita, angka harapan hidup, rata-rata bersekolah), investasi fisik pemerintah daerah, tingkat kesenjangan pendapatan, tingkat partisipasi ekonomi dan politik perempuan, populasi penduduk tanpa akses terhadap air bersih, populasi penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan, dan krisis ekonnomi. Beberapa implikasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah berikut ini. Pertama, peningkatan kualitas penganmbangan manusia melalui peningkatan pendapatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kedua, di saat bersamaan dilakukan kebijakan yang dapat mendukung pemerataan pendapatan. Ketiga, investasi fisik dilakukan secara merata dengan prioritas pada kawasan-kawasan padat keluarga miskin. Keempat, pemerataan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor-sektor informal ekonomi dan politik, sector-sektor di mana sebagian besar keluarga miskin berasal.

3. Widiastuti (2010) Meneliti mengenai “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2008”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable pertumbuhan ekonomi dan penddidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, variable jumlah penduduk dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
4. Prasetyo (2010) Meneliti mengenai “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (studi kasus 35 kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan. Oleh karenanya perkembangan pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran patut menjadi pertimbangan untuk mengatasi masalah kemiskinan.
5. Mirza (2012) Meneliti mengenai “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009”. Kesimpulannya bahwa perkembangan IPM mengalami peningkatan selama tahun 2006-2009, kemiskinan berpengaruh negatif, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif. Berdasarkan penelitian ini disarankan agar dalam merencanakan kebijakan pemerintah tidak hanya melihat dari pencapaian target peningkatan pertumbuhan ekonomi saja namun juga target peningkatan

pembangunan manusia karena pertumbuhan ekonomi sendiri belum memadai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada aspek pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat.

D. Model Penelitian

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar kerangka pemikiran yang skematis :



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya harus di uji secara empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian di bidang ini, adapun hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.
2. Tingkat Pendidikan diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di DKI Jakarta.
3. Tingkat Pengangguran diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di DKI Jakarta.